

Panduan Pengguna

DAFTAR ISI

Apa maksud dan tujuan Toolkit itu?

Untuk siapa Toolkit itu?

Apa struktur dan isi Toolkit?

Bagaimana cara Toolkit itu dikembangkan?

Apa berikutnya?

Reformasi Sektor Keamanan (RSK) semakin diutamakan oleh banyak pemerintah, dan dalam agenda komunitas pembangunan, perdamaian dan keamanan internasional. RSK membuka jendela kemungkinan untuk mengubah kebijakan, lembaga dan program keamanan, dengan menciptakan kesempatan untuk memadukan isu-isu gender.

Pemaduan isu-isu gender sedang diakui bersifat pokok untuk keberhasilan operasional, pemilihan lokal dan pengawasan yang diperkuat. Misalnya, peningkatan perekrutan staf wanita, pencegahan pelanggaran HAM, dan pelaksanaan kerja sama dengan organisasi-organisasi wanita turut menyebabkan keberadaan sektor keamanan yang efisien, bertanggung jawab dan partisipatif, yang menanggapi kebutuhan khusus pria, wanita, anak perempuan dan anak lelaki.

Meski pengakuan pentingnya pemaduan isu-isu gender ke dalam RSK, ada kekurangan sumber daya tentang pokok pembicaraan itu. Toolkit ini adalah respons awal pada kebutuhan untuk informasi dan analisa tentang gender dan RSK. Toolkit ini dirancang untuk menyediakan kepada para pengambil kebijakan dan praktisi suatu pendahuluan tentang pentingnya isu-isu gender dalam RSK dan apa yang dapat dilakukan untuk memadukannya.

Setiap konteks RSK bersifat unik. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa strategi-strategi dan usulan-usulan yang disediakan dalam Toolkit ini tidak dapat diterapkan secara langsung dan harus selalu disesuaikan dengan konteks setempat.

Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari:

- 12 Tools (Alat-alat) (20 halaman masing-masing)
- 12 Catatan Praktis (4 halaman masing-masing, berdasarkan pada Tools)
- Lampiran Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional berkaitan dengan RSK dan Gender

Pokok-pokok persoalan dalam Tools dan Catatan Praktisnya adalah:

1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender
2. Reformasi Kepolisian dan Gender
3. Reformasi Pertahanan dan Gender
4. Reformasi Peradilan dan Gender
5. Reformasi Pemenuhan dan Gender
6. Pengelolaan Perbatasan dan Gender
7. Pengawasan Parlemen terhadap Sektor Keamanan dan Gender
8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Nasional dan Gender
9. Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender
10. Perusahaan-Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender
11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender
12. Pelatihan Gender untuk Aparat Sektor Keamanan



Apa maksud dan tujuan Toolkit itu?

Toolkit itu dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan pertukaran informasi tentang aspek-aspek gender dari RSK antara para pengambil kebijakan, praktisi dan peneliti reformasi sektor keamanan.

Toolkit ini bertujuan:

- Menjelaskan mengapa gender penting dalam proses-proses RSK.
- Menyatakan strategi-strategi praktis untuk memadukan gender ke dalam penilaian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RSK, dengan menggunakan pengalaman dari konteks RSK dan lembaga sektor keamanan yang berbeda.
- Menyediakan bahan untuk mengarahkan pengembangan kebijakan RSK yang tanggap terhadap gender, pada tingkat internasional maupun nasional.
- Menyediakan bahan untuk pengembangan pelatihan tentang isu-isu gender bagi aparat sektor keamanan dan praktisi RSK.
- Menjadi pedoman referensi tentang undang-undang dan standar yang menetapkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, berkaitan dengan reformasi dan lembaga-lembaga sektor keamanan.

Toolkit ini bukan pedoman yang seksama tentang gender dan RSK, tapi merupakan suatu langkah awal dalam penyusunan informasi dan panduan praktis dalam format yang berguna bagi berbagai macam praktisi dan pengambil kebijakan RSK. Kami berharap Toolkit ini merupakan titik mula untuk pengembangan kebijakan dan pelatihan tentang gender dan RSK yang lebih ditargetkan dan praktis oleh badan-badan sektor keamanan dan organisasi-organisasi lainnya yang bekerja dalam bidang keamanan.

Untuk siapa Toolkit ini?

Toolkit ini dirancang untuk menyediakan suatu pendahuluan praktis terhadap isu-isu gender bagi berbagai macam orang yang mengerjakan isu-isu reformasi sektor keamanan. Mereka mencakup para pengambil kebijakan, para pejabat yang mengepalai program dan para konsultan yang mengerjakan RSK dalam:

- Pemerintah-pemerintah negara
- Lembaga-lembaga sektor keamanan
- Organisasi-organisasi internasional dan regional
- Para negara donor
- Organisasi-organisasi masyarakat sipil, yang meliputi organisasi-organisasi wanita

Walaupun Toolkit itu ditargetkan kepada para pakar RSK daripada para pakar gender, Tools (Alat-alat) dan Catatan Praktis tersebut bisa juga menjadi

sumber-sumber daya yang berguna bagi personil yang bertanggungjawab atas isu-isu gender yang ingin meningkatkan pengetahuannya tentang hubungan antara tugas mereka dengan RSK.

Selain itu juga, terdapat pembaca sasaran lainnya untuk Tools dan Catatan Praktis masing-masing, misalnya:

Pengawasan Parlemerter terhadap Sektor Keamanan dan Gender – para anggota parlemen, staf parlemen dan para anggota parlemen daerah dan stafnya.

Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender – perusahaan-perusahaan militer dan keamanan swasta (PMSC, Private Military and Security Companies), para perhimpunan industri PMSC dan klien-klien para PMSC.

Apa struktur dan isi Toolkit?

Umumnya struktur Tools sama dengan struktur Catatan Praktisnya, yang berisi informasi yang disusun dalam bagian-bagian (kecuali Tools 11 dan 12). Sebagai contoh, Tool tentang Reformasi Kepolisian dan Gender disusun sebagai berikut:

1. *Pendahuluan*
2. *Apa itu reformasi kepolisian?*
3. *Mengapa gender penting untuk reformasi kepolisian?*
4. *Bagaimana cara isu-isu gender dapat dipadukan ke dalam reformasi kepolisian?*
5. *Memadukan gender ke dalam reformasi kepolisian dalam konteks khusus*
 - a. *Negara-negara pasca-konflik*
 - b. *Negara-negara dalam masa transisi*
 - c. *Negara-negara berkembang*
 - d. *Negara-negara maju*
6. *Anjuran-anjuran pokok*
7. *Sumber daya tambahan*

Susunan Catatan Praktis tentang Reformasi Kepolisian dan Gender adalah:

1. *Mengapa gender penting untuk reformasi kepolisian?*
2. *Bagaimana memadukan gender ke dalam reformasi kepolisian?*
3. *Tantangan dan peluang pasca konflik*
4. *Pertanyaan-pertanyaan tentang reformasi kepolisian*
5. *Informasi lebih lanjut*

Isi tertentu Tools dan Catatan Praktisnya berubah tergantung pada pokok pembicaraannya. Namun, setiap Tool dan Catatan Praktis meliputi informasi konseptual seperti berbagai definisi gender dan mengapa isu-isu gender penting, dan juga informasi yang berguna seperti studi kasus, kiat dan daftar periksa. Para penulis telah mencoba memasukkan pertimbangan studi kasus dan contoh dari bagian dunia dan konteks negara yang berbeda (negara

pasca-konflik, negara dalam masa transisi, negara berkembang dan negara maju).

Apa definisi RSK?

Tidak ada definisi sektor keamanan atau reformasi sektor keamanan yang diterima secara umum. Para aktor yang berbeda memiliki pemahaman yang lebih luas atau lebih sempit tentang RSK dan berbagai istilah sering dipertukarkan: Namun demikian, nampaknya terdapat konsensus umum mengenai definisi yang dikemukakan Komite Bantuan Pembangunan (DAC) dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD):

Reformasi Sektor Keamanan berarti transformasi sektor/sistem keamanan, *'yang mencakup semua aktor dan peran, tanggung jawab serta tindakan mereka – yang bekerja sama untuk mengelola dan menjalankan sistem tersebut dengan cara yang lebih sesuai dengan norma-norma demokrasi dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, dan dengan demikian berperan menghasilkan kerangka keamanan yang berjalan dengan baik.'*¹

Sistem/sektor keamanan dapat dianggap terdiri dari semua lembaga negara dan lembaga lainnya dengan peran menjamin keamanan negara dan rakyatnya. Lembaga-lembaga ini meliputi:

- **Para aktor keamanan inti:** angkatan bersenjata (termasuk angkatan bersenjata internasional dan regional), polisi, gendarmeries, pasukan paramiliter, pengawal presiden, badan intelijen dan keamanan, pengawal pantai, pengawal perbatasan, pabean, serta satuan keamanan cadangan dan satuan keamanan lokal.
- **Badan-badan manajemen dan pengawasan keamanan:** parlemen/badan legislatif dan komite-komite legislatifnya yang relevan; pemerintah/ lembaga eksekutif, termasuk kementerian-kementerian pertahanan, dalam negeri dan luar negeri; badan penasihat keamanan nasional; lembaga-lembaga adat dan tradisional; badan-badan manajemen keuangan; dan para aktor masyarakat sipil, seperti media, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.
- **Lembaga-lembaga peradilan dan 'rule of law':** kementerian kehakiman, lembaga pemasyarakatan, badan penyelidikan dan penuntutan pidana, lembaga peradilan (pengadilan dan tribunal), badan pelaksana peradilan (jurusita dan penjaga pintu pengadilan), sistem peradilan adat dan tradisional lainnya, komisi HAM dan para ombudsman.
- **Pasukan keamanan non-reguler:** tentara pembebasan, tentara gerilya, satuan pengawal swasta, perusahaan keamanan swasta, perusahaan militer swasta, dan satgas partai politik.²
- **Kelompok-kelompok masyarakat sipil non-formal:** kelompok-kelompok profesi, media, organisasi penelitian, organisasi advokasi, organi-

sasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat.³

Untuk pembahasan lebih lanjut akan konsep RSK, silakan Tool 1 tentang RSK dan Gender.

Bagaimana cara pokok-pokok pembicaraan Toolkit ini dipilih?

RSK mencakup berbagai aktor dan proses, dan terdapat berbagai isu-isu gender yang penting dalam RSK. Toolkit ini berfokus pada bidang-bidang RSK yang didalamnya sumber daya dan kepakaran tentang gender yang ada belum dipertimbangkan. Terdapat bidang-bidang RSK lain yang didalamnya sumber daya tentang gender diperlukan. Misalnya, Toolkit ini tidak berisi suatu tool tentang pemaduan gender ke dalam reformasi badan-badan intelijen, sebagai akibat kekurangan informasi tentang pokok pembicaraan itu. Kami berharap Toolkit ini akan menjadi suatu sumber daya yang berguna bagi orang dan organisasi lainnya untuk mengembangkan upaya dalam bidang gender dan RSK, termasuk dalam bidang-bidang yang di luar lingkup Toolkit ini.

Tidak ada tool yang terpisah tentang perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR, Disarmament, Demobilisation and Reintegration) dan gender karena masih ada banyak sumber daya yang bagus tentang pokok pembicaraan itu. Jadi, DDR dibahas dalam Tools tentang Reformasi Pertahanan dan Pengawasan Parlemen terhadap Sektor Keamanan sebagai satu dari banyak isu.

Apakah Toolkit itu tentang gender atau wanita?

Istilah-istilah 'gender' dan 'wanita' sering dikelirukan dan/atau dipakai sebagai sinonim. Toolkit ini tidak berfokus pada wanita, tapi pada gender, sebagian dengan memasukkan informasi dan contoh bersangkutan dengan kaum pria dan berbagai maskulinitas. Tetapi, informasi tentang kaum pria, maskulinitas dan RSK belum banyak, dan penelitian lebih lanjut diperlukan.

Definisi gender yang kami pakai dalam Toolkit ini adalah:

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap, perilaku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan masyarakat dengan pria dan wanita. 'Karena itu, 'gender' merujuk pada perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan 'jenis kelamin' merujuk pada perbedaan biologis antara lelaki dan perempuan. Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antar kebudayaan dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria tetapi juga pada hubungan antara mereka.

Untuk pembahasan lebih lanjut tentang definisi-definisi gender dan pendekatan konseptual pada pemaduan gender ke dalam RSK, silakan lihat Tool tentang RSK dan Gender.

Mengapa isu-isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dimasukkan?

Orang gay, lesbian, biseksual dan transgender sering menghadapi diskriminasi dan kekerasan karena mereka dianggap tidak menyesuaikan diri dengan peran-peran gender. Atas dasar ini, Toolkit ini meliputi, sedapat mungkin, contoh dan informasi tentang prakarsa sektor keamanan untuk menanggulangi kebutuhan khusus orang LGBT.

Bagaimana cara konteks-konteks negara yang berbeda didefinisikan?

Toolkit ini meneliti RSK dalam empat jenis konteks negara, untuk meneliti apakah ada tantangan dan peluang yang sering ditemukan untuk pemaduan gender. Dengan memakai kategori-kategori yang ditetapkan Divisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tools ini (kecuali Tool 11 dan Tool 12) mencakup bagian-bagian yang terfokus pada:

Negara-negara dalam masa transisi – para negara dalam transisi dari ekonomi yang direncanakan oleh pemerintah pusat menjadi ekonomi pasar, seperti Croatia, Georgia, Federasi Rusia, Tajikistan dan Ukraina.

Negara-negara berkembang – para negara dengan pendapatan nasional bruto yang rendah. Afrika, Karibia, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Asia (kecuali Jepang) dan Oseania (kecuali Australia dan Selandia Baru) diterangkan sebagai 'daerah-daerah berkembang.'

Negara-negara maju – para negara dengan pendapatan nasional bruto yang tinggi, seperti Eropa Barat dan Eropa Utara, Kanada, Amerika Serikat dan Israel.⁴

Tools itu juga memasukkan fokus pada pemaduan gender dalam RSK di negara-negara pasca-konflik, yang didalamnya RSK cenderung mempunyai ciri-ciri khas yang jarang terdapat atau tidak ada dalam lingkungan yang tidak mengalami dampak konflik.⁵ Contoh-contoh para negara pasca-konflik yang dibahas dalam Toolkit ini meliputi Haiti, Liberia, Sierra Leone dan Timor Leste. Tentunya, para negara pasca-konflik mungkin juga menjadi transisional atau berkembang, dan tidak jelas ketika negara yang telah mengalami peperangan tidak lagi 'pasca-konflik'. Sungguhpun begitu, Tools itu memperlihatkan adanya lingkup besar bagi penyesuaian latihan-latihan dari beberapa konteks pasca-konflik dengan konteks lainnya.

Mengapa para negara maju dimasukkan?

Walaupun konsep RSK umumnya tidak dipakai berkaitan dengan para negara maju, reformasi lembaga-lembaga sektor keamanan sering terjadi dan ditemukan pada berbagai tingkat yang berbeda.

Di banyak negara maju, sektor keamanan belum mencegah dan menanggapi secara efektif kekerasan

berbasis gender atau mencapai kesetaraan gender untuk pria dan wanita yang bekerja di lembaga-lembaga keamanan. Para negara maju juga harus memperhatikan pelaksanaan reformasi yang tanggap terhadap gender di sektor keamanan mereka.

Bagaimana cara Toolkit dikembangkan?

Pada tahun 2005, Institut Penelitian dan Latihan Kemajuan Wanita Internasional PBB (UN-INSTRAW) dan Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF) mengembangkan konsep untuk Toolkit ini, sebagai tanggapan pada kebutuhan yang jelas untuk penelitian dan penuntun praktis tentang gender dan RSK. Kantor Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia OSCE (OSCE/ ODIHR, Office for Democratic Institutions and Human Rights) menjadi mitra ketiga dalam proyek tersebut.

Pada bulan Agustus 2006, DCAF dan UN-INSTRAW mendirikan Kelompok Kerja Gender dan RSK, dengan mengumpulkan para pelaksana dan peneliti RSK dari seluruh dunia, bersama para wakil dari Komite Bantuan Pembangunan dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD-DAC), Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB (DPKO), Program Pembangunan PBB (UNDP), Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan (UNIFEM), Dewan Uni Eropa dan Komunitas Ekonomi Afrika Bagian Barat (ECOWAS). Kelompok Kerja Gender dan RSK tersebut berperan sebagai badan penasihat proyek.

Pengembangan Toolkit itu dimulai pada bulan Februari 2007, didanai oleh Kementerian Luar Negeri Norwegia dan OSCE/ODIHR.

DCAF menugasi sejumlah ahli yang terakui dalam bidang-bidang gender dan keamanan untuk menulis Tools 2 sampai 10. Tools tentang Pelatihan Gender untuk Aparat Sektor Keamanan dan Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender dikembangkan oleh UN-INSTRAW, dilandasi serangkaian pembahasan elektronik antara para pakar RSK dan gender yang diadakan pada tengah tahun 2007. Usulan rancangan setiap Tool diperiksa oleh berbagai praktisi RSK, aparat jasa keamanan, para pakar gender, akademisi dan individu-individu yang tertarik. Kira-kira 60 orang memberikan komentar dan usulan yang berharga tentang usulan rancangan tersebut, termasuk praktisi dari Afrika, Asia, Eropa Timur dan Amerika Latin. Selain itu juga, rancangan tools dibahas oleh para penulisnya, para peninjau eksternal dan para pengambil kebijakan dalam lokakarya dua hari yang dihadiri pakar gender dan RSK yang diadakan di Jenewa pada bulan Agustus 2007. Catatan Praktisnya dibuat oleh UN-INSTRAW dan DCAF berdasarkan pada Tools itu. DCAF meninjau dan menyunting Tools dan Catatan Praktisnya dan membuat Toolkit itu.

DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRAW ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap dari banyak orang yang membantu mewujudkan Toolkit ini.

Apa berikutnya?

Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan diluncurkan pada bulan Maret 2008 dan disalurkan secara meluas di format cetak maupun CD ROM dan online.

DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRAW merencanakan beberapa proyek lanjutan pada tahun 2008 dan 2009 yang akan mewujudkan Toolkit ini. Pada

¹ OECD-DAC, Security System Reform and Governance (Reformasi dan Tata Pemerintahan Sistem Keamanan), DAC Guidelines and Reference Series, (OECD: Paris), 2005, p.20.

<http://www.oecd.org/dataoecd/8/39/31785288.pdf>

² OECD DAC, h.20-21. Lihat juga Hänggi, H., Making Sense of Security Sector Governance' ['Memahami Tata Pemerintahan Sektor Keamanan'], 'Challenges of Security Sector Governance [Tantangan Tata Pemerintahan Sektor Keamanan]', para penyunting Hänggi, H., Winkler, T.H. (DCAF: Jenewa), 2003.

³ Ball dan lainnya, dikutip dalam United Nations Development Report 2002 (Laporan Pembangunan PBB 2002) (UNDP: New York), 2002, h.87.

⁴ United Nations Statistics Division (Divisi Statistik

mulanya, Toolkit akan diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia, dan kami berharap sumber daya akan disediakan supaya Toolkit dapat disediakan dalam bahasa lainnya. Bahan-bahan tambahan, termasuk bahan-bahan pelatihan, akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan praktisi RSK yang berbeda di negara dan daerah tertentu. Kami menunggu dengan senang hati kerja sama lebih lanjut dalam pengembangan dan pencatatan praktek-praktek yang baik tentang pemaduan gender ke dalam RSK.

Perserikatan Bangsa-Bangsa), 'Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected economic and other groupings' ('Penyusunan kawasan-kawasan makro geografis (benua), sub-kawasan geografis, dan kumpulan ekonomi tertentu dan kumpulan lainnya'), terubah 28 Agustus 2007. <http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#developed>

⁵ Lihat pembahasan dalam Lae, D., 'The Post-Conflict Security Sector' (Sektor Keamanan Pasca-Konflik'), Buku Kebijakan DCAF No. 14, (DCAF: Jenewa), 2006: http://www.dcaf.ch/_docs/PP14_post_conflictss.pdf, h.2-3, yang berdasarkan atas studi-studi kasus terhadap Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, Haiti, Kosovo, Sierra Leone dan Timor-Leste.

